

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses penatausahaan persediaan pada UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan penatausahaan persediaan kebutuhan pokok telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang berlaku. Penatausahaan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pembukuan atau pencatatan persediaan, penyimpanan, pengeluaran, inventarisasi, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan penerapan standar kebutuhan bulanan sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan persediaan.

Seluruh tahapan melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, serta petugas operasional, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Perencanaan kebutuhan disusun berdasarkan jumlah penerima manfaat dan standar kebutuhan harian yang telah disesuaikan menjadi standar kebutuhan bulanan, serta mengacu pada rekomendasi tenaga ahli, sehingga pengelolaan persediaan tidak hanya memperhatikan ketersediaan, tetapi juga kualitas dan kecukupan bagi penerima manfaat.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas penatausahaan persediaan. Kendala utama adalah keterlambatan

pencairan anggaran pada awal tahun, yang berdampak pada kelancaran pengadaan dan pembukuan. Untuk menjaga kontinuitas pelayanan, UPTD mengambil langkah sementara, namun hal ini berpotensi menimbulkan risiko administrasi apabila pencatatan dan pelaporan persediaan kebutuhan pokok dan pembersih tidak dilakukan secara tertib. Kendala lain adalah kurangnya konsistensi dalam pembukuan dan pencatatan, karena sistem masih manual dan frekuensi keluar-masuk persediaan setiap hari cukup tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan pencatatan, ketidaksesuaian antara stok fisik dan catatan administrasi, serta menyulitkan proses inventarisasi dan rekonsiliasi, sehingga memengaruhi keakuratan laporan persediaan dan tingkat akuntabilitas pengelolaan.

Secara keseluruhan, keterlambatan anggaran dan kurangnya konsistensi dalam pembukuan berdampak pada ketepatan pencatatan, keandalan data persediaan, dan efektivitas pengendalian internal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan efektivitas penatausahaan persediaan kebutuhan pokok dan pembersih, agar pengelolaan persediaan di UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Kota Kupang dapat berjalan lebih optimal sesuai standar kebutuhan bulanan.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Berdasarkan hasil penelitian, UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Kupang perlu meningkatkan kualitas penatausahaan persediaan kebutuhan pokok melalui perencanaan anggaran dan pengelolaan kas yang

lebih tertib dan antisipatif, khususnya pada awal tahun anggaran. Konsistensi pembukuan persediaan perlu diperkuat dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran secara tepat waktu, lengkap dengan dokumen pendukung, sehingga inventarisasi persediaan dapat dilakukan secara akurat sesuai standar kebutuhan bulanan. Data pembukuan dan inventarisasi tersebut kemudian disusun dalam laporan persediaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penguatan koordinasi formal antara bendahara barang, bendahara pengeluaran, dan petugas operasional perlu dilakukan agar proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan persediaan berjalan secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian, baik dari sisi objek maupun pendekatan, dengan mengkaji penatausahaan persediaan tidak hanya pada kebutuhan sehari-hari, tetapi juga jenis persediaan lain yang dikelola UPTD atau instansi pemerintah sejenis. Penelitian dapat dikembangkan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods), serta memanfaatkan analisis sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan persediaan kebutuhan pokok dan pembersih, serta upaya perbaikannya sesuai standar kebutuhan bulanan.